



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI XII DPR RI  
DENGAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

- Tahun Sidang : 2024–2025  
Masa Persidangan : I  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 19 November 2024  
Waktu : Pukul 13.31 s.d. 15.12 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- Acara : 1. Perkenalan;  
2. Progres dan Evaluasi Pelaksanaan Program hingga Triwulan ke-3 Tahun 2024;  
3. Program Strategis Tahun 2025;  
4. Lain-lain.
- Ketua Rapat : Dony Maryadi Oekon, S.T. (Wakil Ketua Komisi XII DPR RI/ F-PDI Perjuangan)  
Sekretaris Rapat : Dwiyantri, S.Sos. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi XII DPR RI)
- Hadir : **A. PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI XI DPR RI:**  
19 orang Anggota hadir dari 45 orang Anggota Komisi XII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:  
**I. PIMPINAN:**  
1. H. Dony Maryadi Oekon, S.T./Wakil Ketua Komisi XII DPR RI/F-PDI Perjuangan  
2. Sugeng Suparwoto/Wakil Ketua Komisi XII DPR RI/F-P.Nasdem
- II. ANGGOTA:**  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)** 2 orang Anggota dari 8 Anggota:  
3. Arif Riyanto Uopdana, S.T.  
4. Shanty Alda Nathalia, S.H.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-P.GOLKAR)** 2 orang Anggota dari 8 Anggota:

5. Drs. Mukhtarudin
6. Dewi Yustisiana, S.H., M.Kn.

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P.GERINDRA)** 3 orang Anggota dari 7 Anggota:

7. H. Rokhmat Ardiyan, M.M.
8. Dr. Ramson Siagian
9. Rocky Candra

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P.NASDEM)** 3 orang Anggota dari 5 Anggota:

10. Irsan Sosiawan, M.B.A.
11. Gulam Mohamad Sharon
12. Dr. Syarif Fasha, S.E., M.E.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)** 2 orang Anggota dari 5 Anggota:

13. Rico Alviano, S.T.
14. Syafruddin, S.Pd.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)** 3 orang Anggota dari 4 Anggota:

15. Nevi Zuairina
16. H. Jalal Abdul Nasir, Ak.
17. Hj. Meitri Citra Wardani, S.H.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)** 1 orang Anggota dari 4 Anggota:

18. Aqib Ardiansyah, M.Si

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-P.DEMOKRAT)** 1 orang Anggota dari 4 Anggota:

19. Dra. Nurwayah, S.Pd.

## **B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

1. Kepala Badan Informasi Geospasial (Prof. Dr. rer. nat. Muh Aris Marfai, S.Si., M.Sc.) beserta jajarannya.

Anggota Izin: : 1. Drg. Alfons Manibui (F-P.Golkar)  
2. Drs. H. Cek Endra (F-P.Golkar)  
3. Drs. H. Rusli Habibie, M.AP. (F-P.Golkar)  
4. DR. (H.C) Christiany Eugenia Paruntu, S.E.,  
S.Th., M.A.  
5. Iyeth Bustami

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./ F-PDI PERJUANGAN)**

Bisa kita mulai?

*Bismillah,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII, Komisi XII DPR RI  
Yang kami hormati Kepala Badan Informasi Geospasial dan jajarannya  
Serta hadirin sekalian,**

Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu guna melaksanakan tugas konstitusional kita. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Bapak/Ibu Anggota Komisi XII DPR RI serta undangan yang hadir dalam acara Rapat Dengar Pendapat hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi XII DPR RI pada masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, pada hari ini, Selasa, 19 November 2024, Komisi XII DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Informasi Geospasial dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda:

1. Perkenalan;
2. Progres dan Evaluasi Pelaksanaan Program hingga Triwulan ke-3 Tahun 2024;
3. Program Strategis Tahun 2025;
4. Lain-lain;

Berdasarkan data sekretariat, Anggota Komisi XII DPR RI yang telah hadir berjumlah 13 orang dari 45 Anggota Komisi XII, yang terdiri atas 8 Fraksi, dari 8 Fraksi yang ada. Dengan demikian, kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi.

Dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1), menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu,

f

Pimpinan meminta persetujuan Anggota agar rapat bersifat terbuka. Apakah dapat disetujui?

Atas persetujuan Anggota, dan dengan mengucakan *Bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.33 WIB)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

Sebelum melanjutkan rapat dengar pendapat ini, kami meminta persetujuan Bapak/Ibu Anggota Komisi XII bahwa rapat dengar pendapat ini selesai pada pukul 15.30 atau dapat diperpanjang setelah rapat dimulai dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kita bersama. Apakah dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

**Bapak/Ibu dan Anggota yang terhormat,**

Mengawali pertemuan pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu Anggota Komisi XII DPR RI periode 2024-2029 yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Silakan dari, silakan dari Pak Rico, silakan memperkenalkan diri. Nanti dilanjut ke belakang, kemudian terakhir ke samping.

Silakan.

**F-PKB (RICO ALVIANO, S.T.):**

Terima kasih, Pimpinan. Izin Bapak/Ibu sekalian.

**Anggota Komisi XII yang saya hormati,  
Bapak Kepala BIG beserta jajaran,**

Izinkan memperkalkan diri, Pak. Nama Rico Alviano, Dapil Sumatera Barat I, Fraksi PKB, nomor Anggota A-205.

Terima kasih.

**F-PKS (NEVI ZUAIRINA):**

Terima kasih.

**Pimpinan, dan  
Anggota Dewan Komisi XII.  
Yang kami hormati Kepala BIG bersama jajaran,**

Saya Nevi Zuairina dari Fraksi PKS, Dapil Sumbar II.

f

Terima kasih, Pimpinan.

**F-P.GERINDRA (H.ROKHMAT ARDIYAN, M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan. Izin, saya Rokhmat Ardiyan, dari Dapil X Jabar, Fraksi Partai Gerindra. Fraksi Partai Gerindra ada 7 di Komisi XII.

Selamat datang Kepala BIG dan seluruh jajarannya yang saya hormati, saya banggakan,

Semoga kita bisa bersinergi bersama-sama dalam penguatan-penguatan dan sinergi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Terima kasih.

**F-P.GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Izin, Pimpinan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ramson Siagian, di Dapil dipanggil Bung Ramson. Dapilnya Jawa Tengah X, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Fraksi Partai Gerindra, sekarang nomornya A-116. Terima kasih, dua minggu yang lalu BIG sosialisasi mengenai batas-batas desa dan kecamatan di Dapil saya, Kabupaten Pemalang. Salam hangat juga dari masyarakat yang hadir waktu itu.

Terima kasih banyak, Pimpinan.

**F-PDI PERJUANGAN (SHANTY ALDA NATHALIA, S.H.):**

Mohon izin, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan, Pimpinan Sidang, dan Rekan-rekan Anggota DPR RI, khususnya Pimpinan dan Komisi, Anggota Komisi XII,  
Yang saya hormati Kepala BIG/Badan Informasi Geospasial, dan Seluruh Pimpinan dan jajaran yang ikut hadir pada RDP hari ini.**

Perkenalkan saya Shanty Alda Nathalia dari Fraksi PDI Perjuangan, nomor Anggota A-207.

Terima kasih, Pimpinan.

**F-PDI PERJUANGAN ( ARIF RIYANTO UOPDANA, S.T.):**

**Yang saya hormati Ketua Komisi XII beserta Seluruh rekan-rekan Anggota Komisi XII,  
Yang saya hormati Kepala BIG beserta seluruh jajaran.**

Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Arif Riyanto Uopdana dari Dapil Papua Pegunungan, Fraksi PDI Perjuangan, nomor A-236.

f

Terima kasih.

**F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO):**

Iya, terima kasih Pimpinan. Memperkenalkan diri saya, Pak, Sugeng Suparwoto, Dapil Jateng VIII, Banyumas, Cilacap, dari Fraksi Partai Nasdem. Sukses untuk BIG, peran sertanya memang sangat strategis menyangkut tentang tapal batas wilayah yang sekarang mulai ada dinamika.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Bapak-Bapak. Terakhir saya perkenalkan diri, Pak Kepala BIG dan jajarannya. Nama Dony Maryadi Oekoen dari Dapil Jabar XI, Fraksi PDI Perjuangan.

Selamat datang kembali di Komisi yang baru, *tapi* isinya lama, Pak. Jadi, Komisi XII isinya VII juga sama ini, Pak.

Kita bisa lanjutkan ya, sudah semua Anggota ya.

**Bapak/Ibu yang saya hormati,**

Badan Informasi Geospasial merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Indonesia, memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan informasi geospasial di tingkat nasional. BIG memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, hingga penanggulangan bencana. BIG berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan data dan yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan dan berbasis pada pemetaan geospasial yang akurat.

Secara keseluruhan, wilayah geografis Indonesia yang sangat luas dan kompleks memerlukan sistem informasi geospasial yang handal, yang disediakan dan dikelola oleh BIG.

Oleh karena itu, pada kesempatan RDP ini, kami Komisi XII DPR RI ingin meminta penjelasan terkait progres dan evaluasi pelaksanaan program hingga Triwulan ke-3 Tahun 2024. Komisi XII DPR RI juga ingin memperoleh penjelasan secara detail dari Kepala BIG terkait program strategis BIG pada tahun 2025, agar pemanfaatan data geospasial dapat memberikan manfaat optimal untuk pembangunan nasional.

**Bapak/Ibu yang saya hormati,**

f

Selanjutnya, untuk efektifnya RDP hari ini, kami memberikan kesempatan kepada Kepala BIG untuk menyampaikan paparannya, sekaligus memperkenalkan seluruh jajaran.

Kami persilakan.

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan Komisi XII DPR RI. Mohon izin, Badan Informasi Geospasial akan memperkenalkan diri dan juga menyampaikan progres dan evaluasi untuk program 2024, serta program strategis di 2025. Saya awali dari saya, Pak:

1. Nama Aris Marfai, Kepala Badan Informasi Geospasial.

*Alhamdulillah*, pada siang hari ini kita *full team* dari seluruh Pejabat Eselon I dan Eselon II di BIG.

2. Sebelah kiri saya, Ibu Sekretaris Utama, Ibu Dr. Ir. Belinda Arunarwati Margono; kemudian
3. Di sebelah kanan saya, Bapak Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar, Bapak Ir. Mohamad Arief Syafi'i, M.Eng. Sc; dan
4. Di sebelah kiri Ibu Belinda, Bapak Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Bapak Dr. Ibnu Sofian, M. Eng.;
5. Bapak Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik, Bapak Dr. Antonius Bambang Wijanarto, sedang berada di Cina untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam kegiatan *United Nation Global Geospatial Information Management* untuk Asia Pasifik.

Kemudian kami juga mengajak seluruh Eselon II kami:

1. Di bawah Sekretaris Utama ada Kepala Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, Pak Akhmad Yulianto Basuki; dan
2. Ada Kepala Biro Umum dan Keuangan, Bapak Drs. Tirto Setiawan; dan juga
3. Plt. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja sama, Ibu Mone Iye Cornelia, ada?; kemudian
4. Di bawah Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar, ada Plt. Direktur Sistem Referensi Geospasial, Bapak Bayu Triyogo yang saat ini sedang berada di Surabaya untuk memberikan pelatihan pada *stakeholders*; kemudian
5. Direktur Pemetaan Rupa Bumi Wilayah Darat, Bapak Dr. Ade Komara Mulyana; dan juga
6. Ibu Astrid Rimayanti, Direktur Pemetaan Rupa Bumi Wilayah Laut dan Pantai yang saat ini, ada? Oh, berada di Bandung untuk kegiatan penyusunan batas pemetaan wilayah laut; kemudian
7. Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupa Bumi, ada Bapak Dr. Ir. Khafid selaku Direktur yang saat ini juga sedang bertugas untuk melakukan perundingan terkait dengan batas; kemudian

8. Di bawah Bapak Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, ada Direktur Integrasi dan Sinkronisasi, Ibu Dra. Lien Rosalina; kemudian
9. Direktur Pemetaan Tematik, Bapak Dr. Gatot Haryo Pramono; dan juga
10. Plt. Direktur Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial, Dr. Dheny Tri Wahyu; dan
11. Di bawah Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, ada Direktur Sumber Daya Manusia, Bapak Dr. Reynard Sumaryono; kemudian
12. Ada Direktur Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial, Bapak Rahman Rifai; dan juga
13. Plt. Direktur Standar dan Teknologi Informasi Geospasial, Pak Iyan Supriana; dan juga
14. Ada Pak Inspektur, Dr. Habib Subagiyo; dan
15. Plt. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial, Ibu Dr. Ratnasari Dewi.

Ya. Lengkap, Pak, kami, Pak.

Sebelum kami melanjutkan, kami menyampaikan dulu sejarah tentang BIG, Pak. Jadi, BIG ini sebetulnya sudah ada sejak 1938, namanya *Permante Kaarterings-Commissie* (Komisi Tetap untuk Pemetaan). Kemudian, tahun 1948 berganti nama menjadi *Raad en Directorium voor het Meet en Kaarteerwezen in Nederlands Indies*.

Dan kemudian 1951, berganti menjadi Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta, serta 1968 menjadi Dewan Survei Pemetaan Nasional, Komando Survei dan Pemetaan Nasional, dan sejak 1969, dulu kita mengenalnya sebagai Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional), dan semenjak itu kita dipimpin oleh Kepala Bakosurtanal yang pertama, Bapak Pranoto Asmoro, mulai 1969 sampai 1984. Dengan adanya Undang-Undang 4/2011, kita berganti nama menjadi Badan Informasi Geospasial, dan sampai dengan saat ini sudah ada 9 Kepala BIG.

Demikian sejarah tentang BIG, kami akan lanjut tentang anggaran di BIG. Secara umum, 5 tahun terakhir, anggaran di BIG berkisar antara 480 sampai dengan 350 miliar. Memang di 2021 sempat perencanaannya 1,2 T, namun kemudian di Pagu DIPA akhirnya menjadi 480 karena pada saat itu anggaran dikonsentrasikan untuk *covid*.

Sementara untuk 2024, anggaran yang ada di BIG, ini totalnya 835 M, dengan blokir anggaran 51 M, sehingga total anggaran minus blokir itu 784 M. Realisasi anggaran untuk tahun 2024 sampai dengan saat ini, itu 88,84%, dan ini terbagi hampir merata di seluruh Kedeputusan yang ada di BIG.

Untuk program prioritas di 2024, kita mendukung untuk prioritas nasional yang pertama dengan program kita untuk garis pantai prioritas yang termutakhir. Kita melakukan pemutakhiran garis pantai karena ini penting sebagai basis untuk perencanaan pembangunan, itu seluas 6.500 km<sup>2</sup>.

Kemudian juga, untuk mendukung prioritas nasional yang kedua, itu terkait dengan kesepakatan batas administrasi desa atau kelurahan yang kita masih kurang banyak. Dari 82.000 itu, belum seluruhnya kita selesaikan, kita cicil.

Tahun ini, kita melakukan tahapan untuk 8.000 desa. Demikian juga peningkatan kualitas *computing*, penyelenggaraan peta dasar, *georeferencing*, dan juga untuk penegasan batas wilayah. Program prioritas ini penting, sekaligus kemarin juga Bapak Presiden minta agar *one map policy* ini menjadi suatu apa namanya..., sarana untuk bisa digunakan dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan. Untuk itu, mohon izin kami menyampaikan urgensi peta dasar skala besar yang sekarang sedang kita laksanakan.

Mengapa kita fokus di skala besar? Karena peta dasar ini, kita gunakan untuk menyusun rencana tata ruang guna meningkatkan investasi melalui *online single submission*. Pemerintah mencanangkan 2.000 RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang itu harus selesai. Dan 2.000 itu berarti membutuhkan peta dasar dari kami yang skalanya detail, skala 1:5.000. Saat ini, baru mungkin sekitar 300-400 bisa dipenuhi. Ini penting untuk proses investasi melalui *online single submission*.

Kemudian, peta skala 5.000 juga kita gunakan untuk penanganan bencana dan menunjang pencapaian *sustainable development goal*, serta untuk penyelesaian batas-batas wilayah, kelurahan, dan juga batas antar negara. Karena, kalau pembangunan berbasis desa, otomatis batas desanya harus ada. Dan juga yang tidak kalah penting untuk pelaksanaan kebijakan satu peta dan satu data Indonesia.

Sebetulnya peta dasar ini sangat krusial, karena kita bisa menggunakan peta ini untuk berbagai keperluan, dan *revenue* kalau kita hitung itu sangat tinggi sekali. Ini peta dasar kita. Dari peta digital saja, kalau kita *install* di HP, itu kita bisa mendapatkan *revenue* lebih dari 600 miliar. Kemudian, kalau peta itu dipakai seperti Google Maps, dan bahkan punya kita akan bisa lebih bagus karena memenuhi 8 unsur sesuai dengan amanat Undang-Undang 4/2011 yang harus ada di peta.

Jadi, ada batas administrasi, ada jalan, ada sungai, ada penutup lahan, kemudian ada bangunan, ada utilitas, ada garis kontur dan ada garis pantai, itu lebih lengkap daripada Google, kalau itu dipakai untuk berbagai proses bisnis, misalnya di transportasi *online*, itu akan meningkatkan *revenue* lebih dari 200 M, dan untuk kegiatan *travel* dan akomodasi dapat menambah *revenue* lebih dari 100 M.\*

Sementara di Pemda sendiri, mereka tanpa harus membuat peta dasar sendiri karena tinggal *nge-update* atau tinggal minta dari kita, itu mereka bisa mendapatkan *revenue* 38 M, dan dari *online market place*, itu lebih dari 10 M, belum yang lainnya.

Masalahnya adalah sampai dengan saat ini, kita belum bisa memenuhi 1:5.000. Ini seluruh Indonesia, karena Indonesia ini sangat luas sekali, 1,9 juta

km<sup>2</sup>. Sampai dengan tahun ini, kita selesai kurang lebih 3% untuk seluruh wilayah Indonesia. Dan ini akan kita kebut. tahun ini *Insha Allah* Sulawesi selesai, tahun depan kami sedang berdiskusi dengan DJA untuk bisa melaksanakan ini dengan segera sesuai dengan amanat Presiden.

Yang kedua, yang menjadi strategis kita, mohon izin, kami juga menyampaikan tentang pelaksanaan kebijakan satu peta. Artinya, seluruh peta yang ada di kementerian dan lembaga, peta-peta tematik mereka itu, misalnya peta tentang mangrove, peta tentang transportasi, peta tentang jalan, peta tentang kepadatan penduduk, peta tentang wilayah kumuh, dan lain sebagainya yang dibuat oleh setiap kementerian, basisnya harus peta dasar yang ada di BIG. Dan kemudian, harus sama standarnya, sama referensinya, dan sama basis datanya agar satu dengan yang lainnya bisa dioperasikan bersama.

Misalnya, kementerian satu minta data dari kementerian lain, itu di-*match*-kan bisa ketemu karena standarnya sama. Itulah kebijakan satu peta. Dan sekarang, kita bisa mengorkestrasi 151 peta tematik dari 24 kementerian dan lembaga, termasuk salah satu yang kemarin agak besar pengaruhnya ketika kita melakukan penataan untuk tata kelola sawit. Kita jadi bisa mengetahui berapa luasan sawit yang masuk hutan, kita bisa mengetahui berapa luasan sawit yang tidak sesuai dengan HGU, dan berapa seharusnya tambahan *revenue* yang dihasilkan pemerintah dari peta atau *existing* sawit yang ada itu.

*Nah*, ini semata-mata sebetulnya kita mengambil dari kebijakan satu peta. Sekarang, kebijakan ini akan dipakai juga untuk Program Swasembada Pangan, menghitung luasan sawah dan produktivitas, serta untuk bantuan sosial dan juga ketahanan pangan. Sehingga, kami sangat berharap dukungan dari Komisi XII agar kebijakan satu peta ini terus bergulir, dan bahkan melibatkan lebih dari 24 Kementerian/Lembaga. Sehingga, tidak hanya 151 peta tematik, *tapi* seluruh peta tematik yang ada di Kementerian/Lembaga bisa disatukan di dalam kita ini.

Yang ketiga, yang menjadi prioritas kami adalah jaringan informasi geospasial nasional. Artinya, bagaimana setiap Kementerian/Lembaga, dan pemda mempunyai Unit Pengelola Informasi Geospasial sendiri, sehingga mereka bisa mengoperasikan data yang sudah sangat banyak tadi. Karena kalau tergantung dari BIG, BIG itu memang *big*, tapi *big* hanya namanya, Pak, *size* sama anggarannya tidak *big-big* amat. SDM-nya juga *nggak* terlalu *big*, hanya 700 orang, sehingga kalau di Kementerian/Lembaga dan pemda itu masing-masing ada unit pengelolanya sendiri, kita akan dapat lebih mudah melakukan pemanfaatan informasi geospasial. Itu tiga prioritas kami yang kami akan mohon dukungan selalu dari Komisi XII.

Dan selanjutnya saya akan menyampaikan untuk program prioritas BIG di 2024 yang sekarang sudah berjalan hampir selesai. Untuk garis pantai yang terprioritaskan, itu kita sudah progres 95%.

Kemudian, untuk PN II, seperti tadi saya sampaikan, untuk mendukung pengembangan wilayah, dan mengurangi kesenjangan, kita ada kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa. Ini progresnya sudah 68%, dan ini kita fokuskan di Pulau Sulawesi sesuai dengan pemetaan dasar kita yang ada di Sulawesi.

Kemudian juga, untuk peningkatan kualitas dan kapasitas *geospatial computing center*, kita bisa bayangkan kalau nanti kita pemetaan seluruh Indonesia, datanya akan banyak sekali. Dan data yang banyak ini harus diiringi dengan kapasitas *computing center* yang bagus, sehingga kita mengupayakan di 2024 ini kita bisa menambah 12 unit *geospatial computing center*, dan juga meningkatkan layanan untuk sarana prasarana di *geospatial computing center*.

Kemudian, untuk peta dasar, seperti tadi juga sudah kami sampaikan, ini progres 63% untuk seluruh Sulawesi. *Insy Allah* tahun ini atau awal tahun depan 1:5.000 seluruh Sulawesi selesai, sehingga DTR yang ada di Sulawesi tidak lagi harus membuat peta dasar, sehingga ada efisiensi yang luar biasa, lebih dari 50% untuk penggunaan peta dasar dalam rangka RDTF.

Kemudian juga, penguatan referensi geospasial, Bapak/Ibu sekalian, agar peta yang kita buat ini *reliable*, bisa dipakai semua orang, bisa di-*update* dan dioperasikan, sesungguhnya ada pekerjaan balik layar yang sangat berat sekali, yaitu sistem referensi. Di mana kita memastikan bahwa referensi yang kita buat itu presisi, dan itu kita dibantu oleh lebih dari 200 atau lebih dari 300 stasiun pasang surut permanen yang kita pasang di banyak pelabuhan di seluruh Indonesia. Dan 300-an itu berarti setiap tahun kita perlu *maintenance*.

Kemudian juga, kita menambah untuk stasiun *continuously operating reference station*, yang saat ini lebih juga dari 250, ada di seluruh Indonesia. Lebih dari 400 untuk stasiun CORS yang harus kita *maintenance*. Kalau ini tidak, maka sistem referensinya yang kurang presisi.

Ternyata data pasang surut, ini selain kita pakai untuk referensi, dipakai juga oleh BMKG untuk *monitoring* bencana dan pemodelan tsunami. Dan stasiun CORS sama titik pantau geodinamik, ini bisa digunakan untuk analisis *land subsidence* dan juga pergerakan lempeng. Jadi, ini sebetulnya dampak ikutan dari pemanfaatan data kita. Data ini beroperasi 24 jam per 7 hari dengan *updating* data setiap detik masuk ke kita.

Penegasan batas wilayah kita laksanakan, progresnya 82% untuk tahun ini, dan dalam 2 bulan ini akan kita selesaikan seluruh target tersebut. Kemudian, untuk program terkait dengan kebijakan satu peta, ini kita punya progres 97%, yaitu untuk 151 peta tematik yang kami sampaikan tadi, ini beberapa kementerian yang kita *concern* untuk mendorong setiap kementerian mempunyai petanya sendiri, peta tematiknya, terutama di ATR, Kementerian BUMN, Kemendagri KKP, Kemenkeu, KLHK, Polri, Menperindag dan beberapa lembaga lainnya. Dan sekarang kita sudah me-*launching* Geoportal 2.0, artinya ada akses untuk masyarakat.

Dulu memang peta-peta ini tidak bisa diakses masyarakat, karena semata-mata peraturan membatasi itu. Dan sekarang sudah dengan peraturan yang baru, Kepres 28/2023, ada kewenangan untuk berbagi akses data geospasial. Dari 151 ini, sebagian sudah bisa diakses untuk publik, kecuali yang memang mengandung kerahasiaan, tidak bisa diakses oleh publik.

Demikian untuk tahun 2024.

Pimpinan, mohon izin apabila diperkenankan lanjut untuk yang 2025. Untuk Pagu Anggaran 2025, sampai dengan saat ini, sementara kita mendapatkan 352.289.000.000, untuk tahun 2025.

Sebagai tambahan informasi, sekarang kita sedang mendiskusikan dengan DJA dan juga Bappenas dan ATR/BPN untuk kemungkinan pemanfaatan *loan* dengan skema *world bank* untuk skala besar agar bisa kita selesaikan dalam waktu 3 tahun. *Tapi* sekali lagi, dengan pidato Bapak Presiden kemarin yang menyampaikan agar *one map* ini didorong terus, ada kemungkinan juga nanti Kementerian Keuangan akan *me-review* kembali, dan skema yang paling tepat akan segera diinformasikan.

Namun demikian, untuk sementara kami masih menulis 352 M dalam anggaran kami di 2025. Dan 352 M ini kita gunakan untuk program prioritas di tahun 2025 untuk mendukung program prioritas nasional nomor 2, nomor 7, dan nomor 8.

Lagi, kita akan meneruskan penegasan batas wilayah 83 kesepakatan unit, kemudian juga dukungan teknis percepatan penegasan batas, ini ada 5.500 desa, sekali lagi ini kita cicil setiap tahun agar segera selesai.

Kemudian, juga penyediaan peta dasar wilayah laut. Kalau tadi 1,9 juta km<sup>2</sup> dengan dana 5 T itu adalah untuk daratan, maka kita juga harus melakukan yang untuk lautan, misalnya lautan ini penting untuk melihat *blue carbon* seperti kandungan *coral reef*, mangrove dan *sea grass*, serta juga untuk batimetri, jalur pelayaran, dan landas kontinen kita.

Kalau kita bisa menambah seperti kita sampaikan, kita laporkan, kita sudah melakukan pemetaan batas landas kontinen, ada potensi penambahan luas landas kontinen Indonesia. Dan ini memang dari penyedia, dari pemetaan laut. Untuk 2025, ini memang alokasinya tidak terlalu besar, 17 M, dan ini akan kita gunakan prioritas untuk Kalimantan, untuk mendukung juga melengkapi data geospasial darat yang juga akan dilaksanakan di Kalimantan untuk 2025.

Kemudian juga, untuk kompilasi integrasi tematik yang 151 peta tematik yang sangat bermanfaat itu. Kita akan lakukan juga kegiatan di 2025 untuk kompilasi, integrasi, dan juga untuk pendampingan ke berapa kementerian dan lembaga agar peta tematik itu bisa terstandar di setiap kementerian dan lembaga.

Kemudian juga, untuk peningkatan kinerja simpul jaringan atau Unit Pengelola Informasi Geospasial di setiap daerah, kementerian dan lembaga

ini. Kita juga menargetkan untuk 16 lembaga, ini mempunyai peningkatan status simpul jaringan.

Kita baru ada 26 Kementerian/Lembaga dan pemda yang Unit Pengelola Informasi Geospasialnya bisa kita lepas sendiri untuk kemudian melakukan pengelolaan dengan bagus. *Tapi* masih banyak, 225, 8, yang statusnya berkembang, bahkan 240 pemda itu juga belum mempunyai Unit Pengelola Simpul Jaringan.

*Nah*, ini kita akan terus mendorong Pemda kerja sama juga dengan Kemendagri agar ada peraturan menteri yang memberikan arahan ke mana sebetulnya Unit Pengelola Informasi Geospasial ini harus diwujudkan. Karena selama ini pemda juga masih gamang, tidak ada aturan. Mereka belum tahu persis apakah ditaruh di Bappeda, Kominfo atau di tempat yang lain, sehingga dengan adanya Permen misalnya, itu agak menguatkan mereka. Saya pikir yang 240 ini karena masih ada kegamangan. Kalau di Papua memang karena pemekaran baru, sehingga belum selesai dengan beberapa Unit Teknis Pendukung Pembangunan di sana.

#### **Kemudian, Bapak/Ibu sekalian.**

Ini tentu juga harus didorong dengan SDM informasi geospasial. *Nah*, ini pemetaan SDM di pemerintah atau ASN kita, yang jabatan fungsionalnya *Surveyor* Pemetaan atau jabatan fungsional yang mengurus informasi geospasial. Belum ada 1.000 untuk seluruh Indonesia.

Di BIG, paling besar mungkin separuh dari pegawai BIG itu adalah ASN *Surveyor* Pemetaan, di ATR/BPN juga sudah ada, di KLHK ada, *tapi* di banyak tempat belum ada, di provinsi baru ada satu atau dua. *Nah* tugas kami mendorong juga ini agar ketika pembukaan ASN, ada formasi ini di setiap daerah. Sehingga nanti Unit Pengelola Informasi Geospasial daerah tadi atau simpul jaringan, ada orang yang mengelola itu.

Peningkatan kualitas *data center* terus kita lanjutkan untuk tahun depan, karena data akan semakin banyak. Tahun ini kita menambah Sulawesi, tahun depannya berarti akan *nambah* Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan seterusnya, sehingga ini harus kita tambah. Kemudian, referensi, titik referensi juga akan kita tingkatkan. Dulu, merasa kita mungkin cukup untuk pemetaan 1:50.000. Karena sekarang petanya detail 1:5.000, sehingga ini juga harus kita tingkatkan untuk referensinya.

#### **Bapak/Ibu sekalian,**

Terakhir sebelum penutup, kita juga menekankan pentingnya geoliterasi. Ini menjadi juga prioritas di BIG, terutama bagaimana teman-teman kita yang mempunyai disabilitas itu dapat memahami informasi geospasial dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan.

Sekarang kita mendorong, kemarin Bappenas juga minta kita untuk mengembangkan ini, dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Sosial

untuk mengembangkan atlas faktual untuk disabilitas netra. Atlas ini untuk teman-teman disabilitas yang menggambarkan tentang Indonesia. Dan bagi mereka ini sangat luar biasa, mereka jadi paham bentuk pulau Jawa, luasan Sumatera, luasan Indonesia, dan lain sebagainya, dan ini meningkatkan wawasan kebangsaan untuk teman-teman disabilitas netra.

Tentu ini kita baru *prototype*, akan kita kembangkan untuk seluruh lembaga pendidikan formal dan nonformal yang terkait dengan disabilitas. Dan juga kita kembangkan untuk berbagai tematik atlas agar wawasan teman-teman penyandang disabilitas semakin luas terkait dengan informasi geospasial.

**Bapak Pimpinan, dan  
Bapak/Ibu Anggota Komisi XII,**

Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan dan dukungannya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih, Pak Kepala BIG. Ini saya agak tergelitik tadi, izin saya agak interaktif dulu, Pak, di peta dasar tadi, peta dasar skala besar tadi itu, Pak, ya.

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Itu anggarannya masuk ke dalam anggaran APBN kita? pembuat, pembuatannya?

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Itu berapa besar?

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Untuk tahun 2024 masuk APBN, kita kemarin mendapatkan 400 miliar, dan itu cukup kita kerjakan untuk seluruh Sulawesi yang sekarang baru berproses. Di 2025 sampai dengan saat ini yang anggaran sementara kita tayangkan itu, kita belum mendapatkan alokasi dari rupiah murni, tetapi pembahasan tentang *loan* sudah berjalan, tinggal menunggu *agreement* oleh Kementerian Keuangan, kemudian kita bergulir.

**KETUA RAPAT:**

Maksudnya, jadi ada *loan* yang untuk membiayai ini?

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Persis baru perencanaan, tinggal nunggu tanda tangan, Pak. Kalau itu berjalan, ada anggaran dari *loan*.

**KETUA RAPAT:**

Terakhir saya tanya, *revenue* itu nanti kepada siapa? *Revenue* dari *patent* masuk ke mana?

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Oke. *Revenue* jelas akan masuk negara melalui PNBPN, hanya nanti skemanya karena ini kan kapitalisasinya bisa luas, BIG mungkin tidak mempunyai kapasitas SDM yang bagus untuk itu. Kita ada skema KPBUMN (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara) yang terkait dengan survei, yang nanti akan melakukan *updating* terhadap peta dasar dan juga mengelola *revenue* itu. *Revenue* akan masuk ke PNBPN dan juga ke BUMN. Satu skema itu, Bapak Pimpinan, yang baru saja kemarin kita dengan DJA melakukan audiensi, ada kemungkinan melalui BLU, *tapi* baru, belum dibahas juga. Jadi, baru sebatas itu, Pak.

**KETUA RAPAT:**

*Nggak*, maksud saya *gini*, kan kita ini rekan-rekan semua ini sebagai informasi yang lalu, anggaran ini kan memang banyak dari tahun 2021 tadi itu kan, kita turunnya itu *nggak* setengahnya, lebih dari setengahnya itu anggaran BIG ini. Dan apa, dan akhirnya ke sininya malah *segitu* terus, *gitu* kan.

Kita berusaha dongkrak, memang kita berhasil *ngangkat* di 2024 kemarin, *gitu* kan. *Tapi* untuk 2025, kita minta penambahan 79 miliar *aja*, belum *disetujui*, *gitu* kan. Makanya dengan adanya ini, kan kita berhak untuk kita mendapat nilai tambah, tambahan lagi dan jadi kita juga bisa *ngambil* dana dari PNBPN, *gitu* loh.

Jadi, supaya ini masukan buat teman-teman semua, karena ini kasihan. BIG ini kita butuh, *tapi* anggarannya kecil sekali. Jadi, kita harus perjuangkan

BIG ini bisa menambah anggarannya untuk, karena ini untuk kepentingan semua di sini, dari tambang, dari apa pun, ini kan peta dasarnya yang kita lihat di sini. Itu kira-kira dari saya.

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Izin, Pimpinan. Apakah diperkenankan kami menyampaikan alternatif pembiayaan yang melalui *World Bank* tadi?

**KETUA RAPAT:**

Boleh, silakan. Sebelum bertanya biar lengkap ya, Pak Anggota. Biar lengkap mereka menyampaikan, jadi kita tahu *nih* arahnya ke mana nanti.

Silakan, Pak.

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan, tayangannya ada ya? Ada.

Jadi, peta dasar skala besar ini akan kita rencanakan. Kalau dari perjuangan kita dengan Komisi VII waktu itu, Bapak/Ibu sekalian, dengan menggunakan rupiah murni, ini berhasil di 2024. Namun, kita tidak mendapatkan lagi di 2025. Kemudian, alternatifnya kita akan menggunakan pembiayaan dengan *World Bank*. Ini kira-kira skemanya seperti ini. Di tahun 2019, ini sebetulnya sudah ada pembahasan *Blue Book*.

Kemudian 2020, ini pembahasan *Green Book*. Kemudian 2021, ini usulan kontrak tahun jamak. Waktu itu belum dapat disetujui oleh DJA Kemenkeu, sehingga BIG diminta untuk mempertimbangkan PHLN dan KPBUMN melalui Perpres 11/2021 tentang KPBUMN Informasi Geospasial Dasar. Kemudian 2022, ini proses perencanaan dan penyiapan KPBUMN, termasuk pemilihan BUMN pelaksana pada saat itu. Kemudian juga di 2023, kita sudah lanjutan penyiapan kontrak KPBUMN. Dan di 2024 ini, memang ini belum selesai seluruhnya, sehingga dengan KPBUMN, ini belum mendalam, Pak, sebetulnya.

Namun kemudian, kita melakukan pengajuan melalui *Integrated Land Administration and Spatial Planning* melalui *projek World Bank* bersama dengan ATR/BPN. Jadi, ada satu komponen di kerja sama *World Bank* dengan ATR/BPN itu digunakan untuk peta dasar BIG.

Di *slide* berikutnya, itu kita sampaikan proses ILAS *project* ini, yang berlangsung dari 2023. Ini agak cepat proses *Green Book*-nya pada saat itu. Kemudian, sampai dengan saat ini, posisi September, itu kita ada negosiasi dan proses buat *approval* untuk *Internal World Bank*. Dan di November ini harapannya ada *loan agreement* yang sudah ditandatangani di Kemenkeu, dan sekarang berkasnya ada di Kemenkeu. Namun, karena belum definitif,

sehingga kami belum berani menyampaikan bahwa itu ada tambahan anggaran di BIG.

Komponen dan ruang lingkungnya, ini untuk *World Bank* ini ada lima komponen. BIG itu ada di Komponen 4, Pak, itu nilainya kira-kira 292 juta *US dollar*. Ini untuk kita gunakan dalam tahun jamak, untuk melengkapi pemetaan di luar Sulawesi, karena Sulawesi sudah menggunakan PPN. Komponen 1, dan komponen, sampai dengan Komponen 3, ini dilaksanakan oleh ATR/BPN dan juga Kemendagri.

Kemudian, detail *budget ILA project*, seperti disajikan pada tabel, sebagian besar untuk akuisisi data dan pemetaan dasar dalam rangka *climate action*. Karena di skema ILAPS itu dalam rangka *climate action*, dan sebagiannya untuk *project management* dan *capacity building*.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Kemarin kami juga diminta oleh DJA untuk menyampaikan apakah ada anggaran tambahan yang akan disampaikan oleh BIG ini? Saya *ndak* tahu ada skema ada pertanyaan itu, sehingga memang sebetulnya kita butuh pendampingan anggaran. Meskipun waktu awal kita bertemu di Komisi VII, kita menambahkan 75, 79 M, itu tidak dapat dipenuhi. Dan kemarin kami berusaha untuk memberikan rancangan kebutuhan pendampingan APBN untuk mendampingi *World Bank* ini.

*Nah*, kira-kira untuk 2025, itu kita membutuhkan 101 M, untuk penguatan kapasitas, karena kita menggunakan banyak teknologi baru, sehingga kita perlu mem-*push* juga SDM kita dan teknologi kita untuk *inheren* dengan itu. Dan juga penguatan jaring informasi geospasial nasional untuk Kementerian/Lembaga, dan pemda tadi, dan penyelenggaraan satu peta seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Itu kira-kira penambahan dari APBN kita yang akan kita rencanakan nanti, mohon juga dukungan dari Komisi XII.

Sebagai *summary*, total nilai *projeck* untuk BIG dari ILAPS atau World Bank ini 292 juta, *project* manajemen 6 juta, sehingga totalnya 298 juta, dilaksanakan dalam durasi, 298 juta, dilaksanakan dalam durasi 5 tahun, 2025 sampai 2029 dengan pelaksanaan kontrak tahun jamak. Dan *disbursement* per tahun disesuaikan dengan target progres pekerjaan yang berjalan.

Harapannya kita di November 2024 ini sudah ada penandatanganan *loan agreement*, sekarang kita tinggal menunggu dari Kementerian Keuangan. Dari rapat dengan dengan DJA kemarin, ini masih dalam pembahasan, belum tahu persis apakah peta dasar akan pakai *loan* ini atau kembali ke APBN.

Kemudian, untuk usulan kita, tambahan APBN rupiah murni untuk mendukung kegiatan ILAP ini sebesar 557 miliar untuk 5 tahun, dari 2025 sampai 2029.

Itu kira-kira yang perlu kami tambahkan, Bapak/Ibu, dan Pimpinan.

f

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih. Berarti, ini ya anggaran yang kita pendampingan untuk *World Bank* ini kan ya? Ini 557 miliar, selama 5 tahun?

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

5 tahun.

**KETUA RAPAT:**

Dengan progres yang tadi ya.

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Ya, persis.

**KETUA RAPAT:**

Dari 2025 sampai 2029. *Nah* itu, ini bahan kita nanti untuk ke depannya untuk memperjuangkan angka anggaran APBN dari geospasial, Badan Geospasial, karena mohon maaf, kemarin kita coba memperjuangkan 79 pun berat kemarin ini Pak. Memang anggaran kita agak susah di untuk 25 ini. *Tapi* mudah-mudahan dengan geraknya teman-teman dari BIG kepada pemerintah, dan ini juga membantu kita juga untuk mendorong supaya mudah-mudahan ini pendampingan untuk *World Bank* ini bisa terlaksana.

Terima kasih atas pemaparannya, Pak, dan penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi XII untuk melakukan pendalaman dengan memberikan tanggapan, pernyataan, maupun pertanyaan. Sesuai Tata Tertib DPR, mohon Bapak Anggota waktunya bertanya maksimal 5 menit, diawali dengan kita *rolling* dulu dari Fraksi. Diawali dari Fraksi PDI Perjuangan.

Silakan.

**F-PDI PERJUANGAN (SHANTY ALDA NATALIA, S.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Terima kasih, Bapak Kepala BIG, beserta seluruh jajaran atas paparannya yang sangat baik sekali. Saya izin bertanya, Bapak, yang pertama, apa peran data Badan Informasi Geospasial untuk mendukung program-program strategis Presiden terkait swasembada pangan, Pak? Seperti pupuk dan lain-lain ya, subsidi pupuk dan lain-lain.

Kemudian, apa juga, bagaimana peran data informasi Badan Informasi Geospasial untuk mendukung energi baru dan terbarukan, khususnya *biomass energy*? Dan apa kendala-kendala yang selama ini dihadapi, termasuk penyediaan peta-peta tematik, Pak, untuk akselerasi, investasi, dan percepatan investasi, dan kepastian hukum para investor yang berinvestasi di Indonesia? Karena ini sangat-sangat krusial.

Tadi saya sepekat apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad, bahwasanya persoalan BIG ini adalah persoalan *one map policy*, satu, eh, kebijakan satu peta, kebijakan peta, satu peta. *Nah*, jadi sangat krusial karena berhubungan sekali dengan investasi yang dihadapi di..., untuk pelaku-pelaku usaha di Indonesia maupun investor yang akan berinvestasi Pak, karena saya lihat masih banyak yang tumpang tindih.

Apa yang kita harus pakai, apa yang pelaku usaha ataupun investor, acuannya apa yang kita harus pakai ini masih membingungkan. Karena Kehutanan punya peta sendiri, ESDM punya peta sendiri, BPN juga punya peta sendiri. Jadi, kami minta tolong diseragamkan, Pak.

Kalau memang peta itu skalanya paling besar 1:5.000, ya kita seragamkan semua. Kadang seperti ini sangat penting, Pak, ya, karena kalau bicara 1:5.000 atau 1:7.000 ini, berbeda, Pak, dari tingkat desa maupun kecamatan ataupun Sabang sampai Merauke ini kalau di *zoom* itu tidak temu gelang, Pak.

*Nah*, jadi ini perlu kepastian hukum agar pelaku-pelaku usaha seperti yang sudah mendapatkan izin IPPKH atau IUP atau apa pun itu Pak, mereka mendapat kepastian hukum. Karena nanti disayangkannya akan ada eksploitasi yang ilegal, karena tidak ada keseragaman ini Pak. *Nah*, jadi ini perlu persamaan persepsi, mana yang harus kita pakai, mana acuannya, Pak.

Itu saja mungkin dari saya, mohon jawabannya.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Silakan dari Fraksi Golkar, silakan Ibu, silakan.

Ini sebentar, ini tadi saya belum ada, beberapa Anggota yang belum memperkenalkan diri tadi ini. Silakan, boleh ya, saya minta Anggota yang belum memperkenalkan diri, Ibu Dewi dulu, silakan memperkenalkan diri dulu. Silakan, Bu Dewi Yustisiana, silakan memperkenalkan diri dulu *aja*, Bu, ini tadi belum selesai tadi perkenalannya.

**F-P.GOLKAR (DEWI YUSTISIANA, S.H., M.Kn.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat siang Bapak-Bapak dari tim Badan Informasi Geospasial. Perkenalkan nama saya Dewi Yustisiana, saya dari Fraksi Partai Golkar, Dapil saya Dapil Sumsel II, Pak, ada 11 Kabupaten. Salam kenal, ini pertemuan pertama saya dengan tim dari Badan Informasi Geospasial ini. Semoga ke depannya kita bisa bersinergi dan bekerja secara maksimal ya, Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan selanjutnya Pak Gulam. Silakan, Pak Gulam.

Dari Nasdem, ada siapa? *Hah?* Perkenalan dulu, Pak, sebentar, Pak, masih *dikenalin*, ini belum tanya *nih*, pas tadi perkenalan masih belum semua nih, Pak.

Silakan dari Nasdem, ya.

**F-P.NASDEM (GULAM MOHAMAD SHARON):**

Siap.

Ya, terima kasih, Pak. Izin, Pimpinan, saya Gulam Mohamad Sharon dari Fraksi Nasdem, Dapil Kalimantan Barat II. Kalau di tempat saya *tuh* terkadang yang jadi masalah *tuh* di perbatasan, Pak, karena kan kita kan hampir 996 km kalau *nggak* salah ya, itu berbatasan antara Serawak *sama* Kalimantan Barat.

*Nah*, kadang-kadang yang beberapa kali jadi masalah *tuh* di ininya, Pak, di perbatasannya. Semoga nanti kalau misal pemetaannya makin jelas di sana *kan*, masyarakat di perbatasan bisa terbantu, Pak, untuk hal itu.

Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Silakan, dua lagi dari Nasdem, Pak Syarif atau Pak Irsan.

**F-P.NASDEM (IRSAN SOSIAWAN, M.B.A.):**

Terima kasih, Pimpinan. Kepada Bapak Kepala Badan Geospasial dan jajarannya, saya ingin mengenalkan diri, saya Irsan Sosiawan dari Dapil Aceh

II, dari Fraksi Nasdem. Terima kasih, salam kenal, semoga kita akan mengawal rencana-rencana Bapak ke depan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Silakan, selanjutnya Pak Syarif , silakan.

**F-P.NASDEM (Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya Fasha, Dapil Jambi, Fraksi Nasdem. Salam kenal untuk Geospasial. Ya, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, terakhir dari PKS, Pak Jalal.

Silakan, Pak.

**F-PKS (H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.):**

Ya. Terima kasih, Pimpinan.

Selamat siang buat kita semua, salam kenal teman-teman, Kepala BIG, dan jajaranya, saya Jalal Abdul Nasir dari Dapil Jawa Barat VII, Kabupaten Kerawang, Bekasi, Purwakarta, Fraksi PKS.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Saya cukup ya, sudah ada semua ya.

Oke, silakan dari Fraksi Golkar untuk bertanya, silakan.

**F-P.GOLKAR (DEWI YUSTISIANA, S.H., M.Kn.):**

Selamat siang Bapak-Bapak, saya mewakili Fraksi Partai Golkar. Pertama, kami menyampaikan bahwa kami mendukung kebijakan satu peta dan di mana kita punya satu sumber data yang terpercaya. Namun demikian, ini masukan dari kita ya, Pak, ya. Jadi, nanti mungkin bisa dijelaskan, lebih

dijelaskan lagi atau lebih di-*elaborate* program kerja dan *outcome* dari 2024 yang mendukung misalnya perlindungan lingkungan hidup.

Yang kedua, Bapak bisa juga menjelas, lebih menjelaskan bagaimana kontribusi Badan Informasi Geospesial ini melalui program kerjanya. Karena sekarang kita konteksnya 2024, melalui program kerja 2024, sehingga dapat berkontribusi dan atau berdampak langsung di dalam pengembangan wilayah dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Yang ketiga, nanti mungkin di dalam materi yang disampaikan berikutnya, Bapak bisa mempertajam *nih*, Pak, penjelasan bagaimana kontribusi BIG melalui program kerja 2024, dan memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan judi. Karena apabila ketiga hal tersebut di atas itu bisa lebih dipertajam, tentunya itu akan memperjelas *added value* dari fungsi dan program kerja yang Bapak-Bapak lakukan setiap tahunnya *gitu*, Pak. Dengan harapan, dengan harapan program *strategy* dan baik peran dan program yang diusulkan oleh BIG, akan bisa kita lebih membantu nanti di dalam memperjuangkan mendapatkan anggarannya.

Dari kita itu *aja*. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Oke, silakan dari Fraksi Gerindra.

#### **F-P.GERINDRA (H. ROKHMAT ARDIYAN, M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Kami dari mau mempertanyakan Pak. Jadi, bagaimana BIG ini hadir untuk mengatasi perselisihan tata ruang yang ada di kabupaten maupun di provinsi, sehingga ini menjadi hambatan dan terhadap iklim investasi.

Pertama, saya sering melihat, Pak, di beberapa kabupaten yang antara eksekutif dan legislatif, belum tercapainya sebuah kesepakatan mana tata ruang yang buat industri, mana yang buat pertanian, sehingga ini menjadi tumpang tindih, sehingga investor takut untuk investasi. Ujung-ujungnya, akhirnya investor kabur. *Nah*, kehadiran Geospasial ini untuk bisa menghadirkan data-data yang lebih lengkap.

Yang kedua harapan kami, kami punya harapan, Geospasial ini, terhadap potensi-potensi daerah ya, baik minerba, kemudian minyak dan lain sebagainya. Ini supaya dibuka secara transparan, ya. Apalagi Indonesia akan menuju energi baru terbarukan, bagaimana potensi-potensi *geothermal* ini biar bermanfaat buat masyarakat.

Yang ketiga, saya terima kasih terhadap kehadiran Geospasial ini terhadap mitigasi bencana. Maka, saya sangat mendukung dari Pak Ketua tentang penambahan anggaran untuk BIG ini agar kinerjanya bisa lebih

maksimal lagi. Saya bersyukur kalau BIG ini bisa buka perwakilan di beberapa provinsi, tidak hanya di Jakarta saja.

Kemudian, pertanyaan saya yang selanjutnya, sampai kapan pelaksanaan kebijakan satu peta dan satu data di Indonesia? Karena kami sangat butuh sekali.

Demikian dari kami, Pimpinan. Nanti ada tambahan dari Bung Ramson. Semoga BIG bisa hadir membantu kesulitan-kesulitan pemerintah dalam pemetaan investasi.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih, Pak.

Silakan, selanjutnya dari PKB.

**F-PKB (RICO ALVIANO, S.T.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Mohon izin, Kepala BIG, mungkin di sini saya hanya sedikit menyinggung mengenai sistem peringatan dini tsunami atau *InaTEWS* yang merupakan program prioritas nasional dan memberikan informasi cepat kepada masyarakat saat terjadi tsunami. Dapat dioptimalkan untuk memastikan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat tidak hanya tepat waktu dan akurat, tetapi juga disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan diakses oleh semua kalangan, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah rawan tsunami.

Jadi, Bapak, saya kebetulan berasal dari Sumatera Barat Pak. Jadi, Sumatera Barat itu daerah yang rawan gempa dan juga berpotensi tsunami. Mungkin di sini saya butuh penjelasan dari Bapak mengenai langkah-langkah strategis apa yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran akan sistem ini? Di antara komunitas lokal, serta bagaimana pelatihan dan edukasi dan diterapkan untuk mempersiapkan masyarakat dalam merespons informasi tersebut secara efektif, sehingga dapat mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh tsunami sebelum mencapai daratan?

Mungkin itu, Bapak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan, terima kasih. Maaf, tadinya seharusnya Nasdem dulu tadi.

Silakan Nasdem, silakan.

**F-P.NASDEM (Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.):**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan, saya punya pengalaman ya, saya pernah di daerah, 10 tahun menjabat. Ada pengalaman terkait dengan pemetaan. Pada saat kami mau merevisi RTRW ya, kami mengkontrak salah satu konsultan. Ternyata biayanya sangat mahal ya untuk membuat skala dipetakan, kami harus membuat 4 BWK, ya. Ternyata untuk 2 BWK itu, kami perlu membayar konsultan 4 miliar, hanya 2 BWK. Dari 11 kecamatan kami petakan jadi 4 BWK, 2 BWK itu 4 miliar.

*Nah*, begitu kami pertanyakan dengan konsultan, dia katakan bahwa kami melakukan foto udara, ya. Menyewa, *nyarter* pesawat dan lain sebagainya. Ternyata konyolnya, data yang dia ambil ini data dari BIG, dia jual ke kami. *Nah*, kami ketahuan itu sudah selesai proses pembayaran. *Nah*, itu satu ya.

*Nah*, yang ingin kami inginkan adalah bahwa BIG ini, bagaimana membuat BIG ini bisa mengakses dan bisa diakses oleh seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang paling utama, karena untuk pembuatan RTRW maupun revisi RTRW ya. Tetapi, kita *ketahui* bahwa peta yang dibuat oleh BIG itu tidak boleh juga dieksploitasi terlalu bebas ya, karena apa? Ini terkait dengan kerahasiaan negara juga ya, tetapi paling tidak kalau ada permohonan dari Kepala Daerah membutuhkan data-data, itu dipermudah. Karena pengalaman kami, mendapatkan data BIG ini agak sulit ya, agak sulit. *Nah*, ini mungkin agak dipermudah. Jadi, kami sepakat, Pimpinan, kalau nanti dana BIG ini kita perbesar, *tapi* dipermudah aksesnya bagi pemerintah daerah, ya.

Kemudian yang kedua adalah berikan pelatihan kepada *surveyor-surveyor* yang ada di pemerintah daerah. Satu di Bagian Pemberitaan, di Bagian Pertanahan, kemudian di Bagian Aset, ya. Paling tidak mereka punya dua atau tiga *surveyor*. Jangan selama ini tergantung dengan BPN, ya. Kita sudah bantu BPN, ternyata kita perlu data-data BPN, kita harus minta BPN ukur ulang. *Nah*, berikan pelatihan, jadi kita tidak tergantung dengan BPN.

Ketiga, buat data peta jaringan yang itu menggambarkan situasi kontur yang di dalamnya ada kandungan-kandungan mineral. Apakah tambang, migas ya, kemudian buangan-buangan limbah dan lain sebagainya. Jadi, dalam penyusunan RTRW, kami tahu nanti, ini daerah untuk limbah, ini daerah untuk industri dan lain sebagainya, ya.

*Nah*, kemudian adalah mempermudah akses yang saya maksud tadi, ya. Permudah akses, *tapi* juga dalam meminta data BIG itu harus meminta surat minimal dari Kepala Daerah. Jangan sampai ini dimanfaatkan pihak-pihak ketiga. *Nah*, jangan sampai pemerintah daerah sulit meminta data BIG, *tapi* pihak swasta sangat mudah mendapatkan data dari BIG.

Itu saja masukan dari kami.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Lanjut dari Fraksi PKS.

**F-PKS (NEVI ZUAIRINA):**

Terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi XII,  
Yang kami hormati Kepala BIG bersama jajaran.**

Memang sangat miris sekali, Pak Kepala BIG, dengan anggaran yang terus turun sampai di tahun 2024, bahkan tahun 2025 turun kembali. Dan ini jadi tantangan buat Kepala BIG dengan tanggung jawab yang begitu berat, *tapi* bisa menyelesaikan masalahnya. Tentu kami dari Komisi XII, pasti akan memperjuangkan untuk penambahan anggaran sesuai yang diharapkan.

Yang dari kami, kami inginkan adanya keamanan data dan informasi geospasial merupakan aspek krusial, Pak, ya. Dan dalam pengelolaan data dan informasi mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari perencanaan tata ruang hingga mitigasi bencana. Persoalan yang berkaitan dengan keamanan data, dan informasi geospasial, serta privasi data, penyalinan data secara ilegal. Tadi seperti disampaikan oleh kawan kita, swasta justru mendapatkannya. Terus juga pencurian data maupun pemalsuan data. Dengan meningkatnya ancaman *cyber* dan kebutuhan untuk melindungi data sensitif, maka BIG perlu menerapkan langkah-langkah keamanan yang komprehensif:

1. Bagaimana strategi BIG dalam menjamin keamanan dan perlindungan data dan informasi geospasial?
2. Apa tantangan terbesar dihadapi BIG dalam menjaga keamanan, dan menjaga keamanan, dan informasi keamanan data dan informasi geospasial, dan bagaimana strategi mitigasi risiko yang telah diterapkan?
3. Apa saja kendala yang menghambat pelaksanaan pengamanan dan perlindungan data dan informasi geospasial?
4. Bagaimana BIG merespons jika terjadi insiden bobolnya keamanan data, Pak, dan informasi geospasial? Dan bagaimana rencana pemulihan yang disiapkan?
5. Bagaimana BIG berkolaborasi dengan pihak lain untuk berbagai informasi terkait ancaman keamanan *cyber* dan praktik terbaik dalam pengolahan data dalam rangka meningkatkan keamanan dan informasi geospasial?

Jadi, perlu perlindungan data untuk data-data yang sudah kita dapatkan nanti, Pak Kepala BIG.

Terima kasih, Pimpinan, itu saja.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Lanjut dengan Fraksi PAN, ada yang hadir? *Nggak* ada, ya. Selanjutnya terakhir dari Demokrat, silakan, ada yang hadir? *Nggak* ada ya. Oke, kita kasih putaran kedua untuk bertanya. Ada? Oh, silakan PDI Perjuangan, silakan.

**F-PDI PERJUANGAN (ARIF RIYANTO UOPDANA, S.T.):**

Baik, terima kasih banyak, Pimpinan.

**Yang saya hormati Kepala BIG beserta seluruh jajaran.**

Terima kasih untuk paparannya yang luar biasa dengan tugas yang begitu besar terkait untuk penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia. Dengan melihat anggaran yang 2025, BIG ini cukup menjadi perhatian kita untuk Komisi XII turut memperjuangkan untuk BIG bisa mendapatkan penambahan anggaran. Karena peran BIG ini dalam penyelenggaraan informasi geospasial sangat penting terkait penyelesaian batas negara, perbatasan kabupaten atau kota, dan juga terkait untuk pemutakhiran garis pantai Indonesia yang dalam kurun waktu beberapa tahun ini terus bertambah panjangnya.

Dengan jumlah desa di Indonesia yang cukup banyak, hampir 83.000. Dengan pemetaannya yang setiap tahun hanya berkisar kurang dari 10.000, ini menjadi perhatian kita dalam rangka untuk penyediaan data peta skala yang besar, Pak. Karena deliniasi batas wilayah desa ini yang berdasarkan *kartometrik* ini, menurut saya penting untuk kita terus dorong ke depan, terutama kami di daerah Papua. Di Dapil saya itu kebetulan kabupaten saya di Pegunungan Bintang, itu perbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini.

Dan di wilayah kabupaten saya ini perlu untuk kita sama-sama pastikan terkait batas wilayah, apakah selama ini masih *natural border*? Ataukah sudah seperti apa batas wilayah? Dan juga terkait dengan jaringan, apa, integrasi jaringan, Pak, antara BIG, terus dengan instansi-instansi terkait pemerintah daerah. Ini perlu terus didorong untuk peningkatannya, karena yang dalam data BIG ini baru terkoneksi 406, dan yang belum terkoreksi ada 215. Dari 215 ini, 180-nya adalah pemerintah kabupaten dan kota, sehingga kami komitmen juga untuk mendorong penambahan anggaran di BIG.

Terima kasih, Pimpinan. Waktu saya kembalikan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih, Pak.

Lanjut dari Fraksi Golkar, ada lagi yang mau bertanya? Oh, Bu Dewi lagi, silakan.

**F-P.GOLKAR (DEWI YUSTISIANA, S.H., M.Kn.):**

Ya, menindaklanjuti tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, Pak. Pada dasarnya kita mendukung untuk penambahan data, *eh*, penambahan dana untuk BIG ini ke depannya, *tapi* yang Bapak harus fokuskan menurut kami adalah bagaimana memastikan menambah *added value* dari program-program yang Bapak usulkan.

Tadi, saya juga menangkap aspirasi dari teman-teman mengenai misalnya tumpang tindih, ada wilayah mungkin pertambangan atau mungkin HPH. *Nah*, dan ada juga tadi yang menyampaikan aspirasinya bahwa peta yang disusun oleh BIG ini juga bisa mencakup informasi mengenai potensi migas atau minerba.

Saya, mungkin Bapak bisa jelaskan, sebetulnya sejauh mana peta yang dibuat oleh BIG ini bisa meng-*cover*? Poin apa *aja* Pak? Apakah juga bisa meng-*cover* misalnya, bisa Bapak juga bisa dengan, apakah Bapak melakukan sendiri FGD atau kajian? Ataukah Bapak berkoordinasi dengan departemen terkait, departemen teknis terkait di bawah masing-masing kementerian? Misalnya dengan ESDM, untuk mengetahui daerah-daerah yang punya potensi, baik itu migas ataupun minerba atau juga misalnya dengan Kementerian Kehutanan untuk mengetahui HPH yang sudah diberikan atau mungkin tanah-tanah yang bisa dijadikan, akan dijadikan HPH atau diberikan. Yang semacam itu *tuh*, Pak.

Kalau Bapak bisa lebih memaksimalkan *added value* dari penggunaan peta yang disusun dengan kebijakan, selaras dengan kebijakan satu peta yang tadi disampaikan, tentunya itu akan punya manfaat yang sangat besar. Termasuk juga mungkin, saya tidak tahu apakah bisa juga meng-*cover* misalnya potensi-potensi daerah yang mungkin juga bisa berguna untuk pengembangan, baik pertumbuhan atau pengembangan bisnis atau investasi.

Itu *aja* dari saya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke, silakan dari Fraksi Gerindra.

Silakan, Pak.

**F-P.GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Terima kasih, Pak Ketua.

Singkat-singkat *aja nih*, Pak Kepala BIG. Tadi, teman-teman sudah banyak menyampaikan yang substantif, *tapi* dari referensi 2 minggu yang lalu, sosialisasi mengenai batas-batas desa, dan batas-batas kecamatan, itu sangat menarik untuk masyarakat di Dapil. Kemarin yang hadir dari 3 kecamatan, mereka sangat tertarik. Saya pikir anggaran untuk itu perlu di tambah juga alokasinya. Diajukan *aja ya*, Pak Pimpinan, ya, Pak Ketua, ya.

Jadi, kita semua Anggota Komisi XII, *pas* mungkin mau Reses, maupun Dapil bisa sosialisasi di kabupaten-kabupaten tertentu di Dapil masing-masing. Dan sangat menarik, karena mereka jadi tahu untuk mengetahui batas-batas desa dan kecamatannya.

Kemarin itu sangat apresiasi itu Pak Doktor yang hadir, Pak Joko, apa? Pak Gatot, Profesor Doktor Gatot, Pak Doktor Gatot yang hadir langsung. Jadi, menjelaskan cukup bagus. Jadi, saya pikir itu perlu anggarannya, bila perlu caranya bagaimana, Pak Ketua? Diajukan tambahan, supaya kita semua Anggota Komisi XII juga mengajak BIG untuk memberikan sosialisasi di Dapil kita. Jadi, masyarakat juga lebih senang. Itu yang pertama.

Yang kedua, Pak Kepala BIG, itu juga punya ini, dengan sistem *sky map* juga dilakukan ya dengan *drone* ya pemetaan itu ya? *Oh*, sedikit interaktif, Pak Ketua, itu punya *drone* juga? *Nggak*? Atau di pihak ketiga yang melakukan pemetaan dengan *drone*?

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Kita punya *drone*, Bapak, bahkan *drone* untuk laut, di air kita sudah punya.

**F-P.GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Lengkap, ya?

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Iya.

**F-P.GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Oh.

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Dan *drone* yang terbangnya dengan seperti pesawat, naik dulu baru terbang, kita juga punya. *Fixed wing* namanya.

**F-P.GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

f

Kalau pilot ada berapa banyak *drone*-nya yang sudah dimiliki BIG?

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Kita pilot antara 5 sampai 10 yang *certified*, *tapi* yang lainnya juga bisa mengoperasikan, dalam proses untuk sertifikasi pilot.

**F-P.GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Sudah cukup canggih, memang harus kita dukung.

Terima kasih, *makasih* banyak, Pimpinan, *makasih*.

**KETUA RAPAT:**

Ya, *makasih* ya. Terima kasih, Pak Ramson.

Lanjut dari Fraksi Nasdem.

**F-P.NASDEM (IRSAN SOSIAWAN, M.B.A.):**

Terima kasih, Pimpinan. Saya langsung saja untuk menyampaikan ke Bapak Kepala Badan Geospasial. Saya ingin menyampaikan ini, Pak, pentingnya dukungan teknis, dan penyediaan data, serta standar geospasial dalam penegasan batas desa atau kelurahan, Pak. Karena banyak data yang saya alami tumpang tindih, Pak, dalam pemanfaatan lahan di Indonesia, termasuk di Aceh, Pak, di Dapil saya. Menjadi salah satu kendala utama dalam perencanaan dan pembangunan.

Ada lagi, Pak, yang saya perlu ingin sampaikan juga di sini, bahwa di Aceh ini, proses penegasan batas dan desa menghadapi tantangan, Pak, salah satunya karena keterbatasan pemahaman aparat desa terhadap peta *kartometrik* Pak. Berdasarkan penelitian, banyak wilayah di Aceh yang menggunakan peta batas tidak resmi, sehingga berpotensi memicu konflik antara wilayah Pak. Ini yang kami selalu alami Pak. Jadi, batas antara kabupaten dan kabupaten tetangga. *Nah*, mereka selalu merujuk kepada tapal batas dan segalanya. *Nah*, ini yang selalu, yang kita hadapi di Aceh, Pak.

*Nah*, pertanyaan saya ini, Pak, saya ingin menanyakan dan meminta klarifikasi, bagaimana Badan Informasi Geospasial ini pastikan data, serta standar Geospasial dalam menegaskan batas desa dan kelurahan yang dilakukan secara tepat? Mengingat Aceh memiliki karakteristik khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, bagaimana penyelesaian kendala teknis seperti ini, Pak? Kekurangan pemahaman yang dihadapi pada aparat desa terhadap metode *kartometrik* Pak. *Nah*, hal ini yang perlu saya sampaikan.

Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabakatuh.*

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dilanjutkan PKB, ada lagi? *Nggak* ada. Lanjut ke PKS, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Pak Jalal.

**F-PKS (H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.):**

Terima kasih, Pimpinan. Bapak Kepala BIG, di laporan presentasi kan ada terdapat blokir dari Kemenkeu ya sebesar 51,5 miliar itu, bisa dijelaskan pemblokiran itu seperti apa? Apakah itu tidak berdampak langsung terhadap pencapaian target-target BIG di 2024?

Kemudian, terkait dengan Kebijakan Satu Peta ini *kan* sangat strategis sekali, *gitu* ya. *Insyallah*, teman-teman tadi sudah banyak menyampaikan, Komisi XII akan *men-support* untuk penambahan anggaran ini. Mudah-mudahan dari kerja sama dengan anggota tim bisa *direalisasikan*. Tadi *kan* Bapak menyampaikan 400 miliar itu hanya untuk Sulawesi, Pak, ya, benar, Pak, ya? Memang dari awal, *planning*-nya seperti itu ya, Pak, ya?

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Iya, Bapak. Jadi, awalnya kami mengajukan untuk skala besar, oleh Kemenkeu hanya diberikan 400, ajuan kita sebenarnya lebih. Kemudian, bersama Bappenas kita melakukan evaluasi, 400 ini kalau dilakukan pemetaan *pas* untuk mana secara luasan dan *effort* kita. Sebetulnya kita ingin Kalimantan masuk dulu, Pak, *tapi nggak* cukup, dananya Kalimantan hanya cukup di Sulawesi.

**F-PKS (H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.):**

Saya kira Program Satu Peta ini harus jadi prioritas banget ya, karena ini Asta Cita Pak Prabowo ini *kan* luar biasa ya, sangat strategis sekali untuk 5 tahun ke depan, dan untuk *goal* 2045 Indonesia emas. Jadi, saya kira tadi teman-teman sudah menyampaikan betapa banyak masalah tentang tumpang tindih sebagainya itu. Apakah memang tadi di yang Bapak presentasikan itu, *planning*-nya 5 tahun ya, Pak, ya, ini ya selesai semua itu?

Oh ya, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke, selanjutnya, PAN tidak ada, Demokrat tidak ada. Cukup ya? Bapak/Ibu, sudah cukup ya?

Silakan dari BIG untuk menjawab. Singkat, padat untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman Komisi.

**F-PDI PERJUANGAN (SHANTY ALDA NATHALIA, S.H.):**

Izin, izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Oh, boleh.

**F-PDI PERJUANGAN (SHANTY ALDA NATHALIA, S.H.):**

Ada sedikit saya tambahkan untuk rekan-rekan BIG. Bapak, sebelum, saya rasa sebelum untuk..., kami semua mendukung ya Komisi XII untuk penambahan anggaran di BIG, tetapi sebaiknya kita juga perhatikan sebelum hal itu, terkait mungkin rekan-rekan di BIG bisa mengecek infrastrukturnya dulu, Pak. Sistem aplikasi yang ada di BIG, ini masih saya rasa agak aneh dan kurang *user friendly* ya, karena portal yang ada di dalam BIG itu berbeda-beda, Pak, akunya.

Jadi, akunya ini juga kadang kita mau masuk di SRGI, itu berbeda dengan akun yang di SIPIT. *Nah*, jadi kalau kita ibaratnya Gojek atau Grab, itu *kan* di dalam itu ada bisa pesan *GoFood* dan macam-macam. *Nah*, ini portal BIG ini, akun SRGI berbeda dengan akun yang lain. *Nah*, di sini dan kadang juga koordinatnya juga suka *error*, Pak.

*Nah*, itu sebelum ke sana, saya pikir infrastrukturnya dulu, Pak, kita rapikan benar, karena ini anggaran besar yang akan dikeluarkan oleh negara. Ini menjamin kepastian hukum dan kemudahan ya untuk semua pelaku usaha, baik yang sudah berinvestasi maupun yang akan berinvestasi di Indonesia.

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan Pak BIG untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan.

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi XII atas arahan dan juga masukannya. Pada dasarnya, Badan Informasi Geospasial mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh seluruh Anggota Komisi XII untuk keberlangsungan penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia.

Beberapa hal yang penting yang krusial. Yang pertama, kaitannya dengan bagaimana informasi geospasial ini bisa mendukung program Presiden termasuk swasembada pangan dan energi terbarukan? Kita dengan skala 1:5.000 ini, nanti kalau bisa diintegrasikan dengan data statistik, maka proses intervensi bantuan sosial akan dapat dilakukan dengan bagus. Dan untuk swasembada pangan, kita bisa melakukan pemetaan terkait dengan lahan sawah, dan juga akses untuk pemberian pupuk. Karena skala 5.000 ini detail, sehingga luasan dan juga produktivitas bisa dihitung. Yang hanya saja kita sekarang masih ada *concern* adalah kita belum mempunyai citra satelit sendiri, sehingga harus melakukan pengadaan citra satelit, Bapak/Ibu.

Sementara citra satelit dulu diadakan oleh LAPAN sebagai lembaga pemerintah yang ditugasi untuk mengadakan citra satelit itu, sehingga Kementerian/Lembaga tinggal minta. *Nah*, saat ini karena LAPAN tidak ada, ini kita belum tahu persis apakah pengadaan itu masih *continious*, karena kemarin saat kita diminta untuk *updating* peta sawit, kita harus menggunakan citra terbaru. Indonesia belum punya dan belum beli juga, kemudian kita juga tidak bisa beli karena memang tidak punya otoritas untuk beli, akhirnya kita menggunakan arsip, *archives* itu yang tahun agak lama, 2021, dan ini menjadi *concern* kita.

Kalau nanti kita bisa mendorong, bahwa fungsi pengadaan citra satelit itu diadakan, dihidupkan kembali. Apakah ditaruh di BIG atau ditaruh di lembaga lainnya atau di LAPAN lagi, tidak masalah, yang penting itu harus ada, karena itu untuk *updating* kebencanaan dan juga untuk yang energi terbarukan. Kalau kita bisa memetakan luasan biomass untuk energi itu, kita bisa *ngitung* produktivitasnya. Itu yang pertama.

Kemudian, untuk tumpang tindih. Dengan skala besar nanti semakin detail, semakin kelihatan, termasuk kita sekarang sudah mengumpulkan 151 tematik itu sudah bisa mengurangi tumpang tindih seluas 20 juta hektar atau 10% lahan tumpang tindih yang ada di Indonesia.

Kemudian, yang ketiga, terkait dengan *add value* dari peta skala besar ini. Itu sebetulnya juga kaitannya untuk pengurangan, pencegahan korupsi, karena peta dasar ini digunakan untuk basis tata ruang detail. Tata ruang detail sebagai basis untuk *online single submission* dan *online single submission* sebagai basis untuk pemberian izin investasi, sehingga dengan adanya data ini sebetulnya kita bisa membantu banyak untuk pengurangan apa namanya, kasus suap, terutama suap perizinan.

Kemudian, yang kedua, narkoba juga begitu. Selama ini kita membantu BNN untuk pemetaan ladang ganja, sebelum BNN melakukan pemusnahan. Jadi, ketika BNN melakukan pemusnahan itu, datanya dari kami Bapak/Ibu. Sekali lagi kami perlu *data update* citra satelit itu, kaitannya dengan itu juga. Kalau negara belum bisa mempunyai data terbaru, kami juga sulit memberikan informasi terbaru kepada BNN. Beberapa kasus yang tahun kemarin, beberapa bulan yang lalu kita melakukan operasi untuk pemusnahan ini. Ini peran kita di dalam narkoba.

Kemudian juga dengan program Presiden ini, *add value* peta dasar yang akan kita buat nanti untuk membantu pemetaan kemiskinan ekstrem dengan data statistik. Dan juga intervensi bantuan ke mana, itu akan lebih jelas karena petanya detail 1:5.000, termasuk kita bisa melakukan pemetaan fasilitas sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, dan juga untuk beberapa fasilitas yang menopang program makanan bergizi, itu akan bisa kita lakukan.

Kemudian juga untuk *concern* kita bersama tentang keamanan data. Ini secara fisik.

**INTERUPSI F-P.GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi sedikit, Pak Ketua.

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Siap.

**F-P.GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi sedikit. Mau *nanya*, tadi kan bisa peta sekolah, mau fokus peta rumah seseorang bisa ya, lihat ya, Pak, ya?

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Kalau rumahnya bisa, *tapi* tergambar, cuma kepunyaan siapa, kita yang tidak tahu dan harganya berapa kita yang tidak tahu.

**F-P.GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Ada kolam renang atau *nggak*, bisa tahu?

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Kalau 1:5.000 ketahuan, Bapak. Cuma di dalam kolam renang ada siapa, kita yang *nggak* bisa tahu.

**F-P.GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Oh, *makasih*.

**PESERTA RAPAT:**

Ya itu, Pak Ramson takutkan itu.

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Mohon izin kami lanjutkan, Pak. Untuk terkait isu keamanan data, Pak. Keamanan fisik itu untuk server dan *storage* kita menggunakan *firewall* antivirus dan lain-lain, ini kita *dobel* tentu. Kemudian, untuk keamanan aplikasi ini dengan *testability* terhadap celah keamanan, dan kita juga bekerja sama dengan BSSN untuk ini. Termasuk kemarin waktu ramai-ramai di beberapa tempat *kebobol*, tempat kita tidak *kebobol*, *alhamdulillah*, ya.

Kemudian, SDM tentu kita juga perlu tingkatkan, terutama kita *pengen* sebetulnya SDM kita, dan kita bisa membentuk *computing security respon team*. Ini yang baru kita pikirkan, tadi kerja sama dengan BSSN.

Dan juga data kita sebetulnya kita *mirror*. Jadi, kita punya *mirror* di Batam, Pak, Bapak/Ibu sekalian. Jadi, ada data *backup* kita di Batam. Kemudian, kita juga menggunakan beberapa *software* unik, yang *base* sistemnya untuk aplikasi dan servis.

Kemudian, untuk keamanan data juga, kita mencoba. Karena ini kita kejar-kejaran dengan skala 1:5.000, seluruh Sulawesi datanya sudah besar sekali, Pak, ini. Jadi, kita harus, *computing centre* kita harus kuat, belum lagi kalau nanti kita *ngelola* yang Kalimantan, Jawa dan sebagainya. Ini kita akan membuat Pokja Keamanan dari unsur kita.

Kemudian, unsur intelijen. Kemudian, unsur intelijen itu ada dari BIN, dan dari BAIS, dan juga dari BSSN, dan ini akan kita masukkan dalam tim keamanan yang sekarang sudah proses sekarang untuk mem-*backup* data kita. Kemudian, juga kita melakukan *testing* untuk insiden keamanan yang seperti tadi saya sampaikan.

Kemudian, untuk blokir. Yang tadi disampaikan, ada 51 M. Ini memang untuk *automatic adjustment* 46 yang isinya belanja barang dan belanja modal Pak. Dan juga belanja khusus perjalanan, serta untuk kegiatan di BIG. Namun ini sebetulnya bisa kita, sudah bisa kita selesaikan yang untuk ini. Kemudian juga untuk terkait dengan kepastian hukum untuk investasi, ini tadi sudah kami sampaikan, termasuk tadi yang dari pemda. Memang, Pak, sebetulnya peta BIG itu gratis untuk yang 50.000, 25.000, dan juga 5.000, hanya *ngakses*, Pak. Kalaupun tadi sempat dijual, berarti ada oknum yang memperjualbelikan di luar BIG dengan pemda, ada brokernya, harusnya itu tidak berbayar.

Nanti kita akan menggunakan skema, karena kita perlu *revenue* juga untuk yang 5.000 sesuai..., misalnya kita bayangkan kita punya seperti Google Maps, maka nanti itu *revenue*-nya dari servis. Jadi, misalnya kita sudah melakukan analisis *routing*, misalnya jarak, kemudian *buffering* dan berbagai analisis lainnya, itu memang nanti ada *charge*. Sebetulnya juga bagus kalau misalnya setiap *handphone* baru yang ada di Indonesia itu ada peta dari Indonesia yang ter-*install* di situ. Itu kita bisa nge-*charge* 2.000 atau 3.000 luar biasa skalanya besar sekali, *tapi* yang ini kita perlu evaluasi lagi terkait dengan regulasi yang ada.

Kemudian, juga kelebihan peta kita, karena nanti kita menciptakan peta dibanding Google, Pak. Google itu mungkin informatif ya, *tapi* tidak presisi.

Kemudian, batas administrasi, dia tidak punya yang formal, kita punya yang formal, batas desa, dan sebagainya. Kemudian, kita punya tiga dimensi untuk ketinggian kontur sampai dengan bawah laut, yang BIG tidak, *eh*, Google tidak punya. Saya bisa bayangkan kalau kita ini sudah *available* 5.000, kayaknya Google juga akan pakai peta kita. Jadi, untuk di Indonesia, Google akan menggunakan peta kita. Dan 3D ini yang sangat mahal sebenarnya, karena tiga dimensi ini yang sangat mahal. Untuk menghasilkannya mahal, kemudian juga besar datanya, dan untuk *smart city* kita perlu menggunakan itu. Itu terkait dengan peta skala besar.

Kemudian juga untuk perselisihan ruang. Yang tadi sudah saya sampaikan, basisnya seharusnya peta tata ruang, dan peta tata ruang itu harusnya peta dasarnya dari BIG. Tadi kalau ada misalnya membuat satu tata ruang sampai 4 miliar, kalau peta dasarnya sudah ada, saya jamin turun 50% lebih, Pak, karena ATR/BPN itu menganggarkan 1 miliar untuk 1 RDTR *plus* membuat peta dasarnya. Nanti kalau peta dasar dari BIG sudah jadi, harusnya bisa jadi 500 juta, karena memang 50%-nya untuk operasional itu.

Namun demikian, Pak, sekali lagi, ini daerah juga belum tentu bisa *narik* petadari kami kalau tidak punya SDM yang bagus, sehingga kita *pengen* jaringan informasi geospasial tadi atau Unit Simpul Jaringan tadi di pemda harus ada yang agar dia bisa *narik* itu.

Kemudian juga kita mendorong berbagai kementerian, termasuk misalnya Kementerian Kehutanan, kementerian lainnya untuk meningkatkan kualitas peta tematiknya masing-masing, agar itu menjadi bagian. Kalau kementerian yang lain minta, bisa diberikan dengan konsep satu data tadi.

Terima kasih Ibu untuk masukan terkait dengan akun di SRGI dan Geoportal. Ini ada beberapa hal, karena kita melakukan *updating* dan peta yang ada di dalam itu ada yang skala 50.000 awalnya, kemudian 25.000, dan sekarang detail 5.000. Jadi, ada kemungkinan juga kita perlu penyesuaian agar itu menjadi *user friendly*. Termasuk kita ingin menyatukan, karena ini pesan waktu itu dari pemerintah, dari Presiden, aplikasi-aplikasi ini dikurangi, dan dalam rangka itu, kita baru menyatukan.

*Tapi* saya yakin proses ini *nggak* akan lama, karena seluruhnya menunggu kita juga. Jadi, kita akan perbaiki hal yang kecil-kecil tadi, *tapi* sangat menjadi *concern* untuk *user* kita atau untuk pengguna kita yang akan mengambil itu.

Saya pikir secara umum sudah saya jawab semua, kecuali kalau ada beberapa yang terlewat, mohon masukan dari Bapak/Ibu Anggota Komisi XII.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih, Pak Ketua BIG. Ini ada tambahan sedikit dari Pak Sugeng.

f

Silakan, Pak Sugeng.

**F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO):**

Ya, terima kasih, Pimpinan. Ya, apresiasi setinggi-tingginya Kepala Badan Informasi Geospasial. Kita tahu betul peran strategisnya Badan Informasi Geospasial, baik dalam konteks sengketa horizontal yang biasanya terjadi *nih*, perang antar desa ini sering terjadi menyangkut tapal batas ini, *gitu*. Dan juga aspek-aspek lain. Bahkan dalam skala besar, saya kira baru-baru ini sempat mengejutkan kita semuanya, dan dikoreksi oleh Kementerian Luar Negeri misalnya, soal *dot nine* atau *nine dot* di Natuna Utara itu. Jadi, kita minta Kepala Badan Informasi Geospasial, bahwa tapal batas negara kita ini harus tuntas. Menyangkut tentang tapal batas 12 mil laut *plus* 200 mil laut, Zona Ekonomi Eksklusif kan biasanya demikian.

Kenapa demikian? Kita kebetulan di sini juga Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, ada blok-blok gas yang di ZEE, di Zona Ekonomi Eksklusif, misalnya apa yang terjadi di Andaman. Itu dan juga di Natuna, meskipun yang baru-baru ini *kan*, itulah kurang lebih.

Kita menangkap maksud baik yang disampaikan oleh Pemerintah Pak Prabowo. Jadi, kita tanpa mengurangi kewilayahan kita, *tapi* kita mau *joint development lah, gitu*. Jadi, yang penting jelas dulu tentang batas, tapal batas wilayah kita. Meskipun China mengklaim sepihak sebagai, apa, ya, latar historislah dia. Ada dulu ada Jalur Sutra dan sebagainya-sebenarnya, termasuk di Natuna Utara itu yang dia katakan merupakan jalur tradisional perdagangan mereka, lantas diklaim menjadi wilayah historis mereka, padahal ya dalam hukum internasional telah diakui itu wilayah kita.

Jadi, BIG di samping tadi membuat peta wilayah yang *proven, tapi* juga BIG harus mempromosikan bukan hanya keluar, *tapi ke, eh*, bukannya ke dalam, *tapi* juga keluar. Ada forum-forum Internasional, BIG harus proaktif di forum-forum PBB menyangkut tentang kewilayahan, harus *declare* bahwa wilayah Indonesia terdiri dari wilayah bujur timur sekian, bintang utara sekian, dan seterusnya, sebagaimana *metoda-metoda* yang disampaikan.

Jadi, jelas *proven* wilayah Indonesia, baik perbatasan di perbatasan di darat, maupun dan laut yang mengandung banyak sekali mineral, termasuk tentang bagaimana kekayaan ikan kita misalnya. Jadi, TNI atau siapa pun dengan apa yang disampaikan oleh BIG itu menjadi menjalankan tugas dengan *proven*. Tembak di tempat kalau memang itu mencuri di wilayah kita, *kan* kurang lebih itu.

Sekedar tambahan saja, Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

f

Siap, terima kasih. Saya pikir cukup. Cukup Bapak-Bapak/Ibu-Ibu semua.

Terima kasih atas paparan, dan jawaban, dan juga masukan dari rekan-rekan Komisi XII.

**Bapak Ibu yang saya hormati,**

Demikianlah jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan oleh kita semua. Apabila tidak ada hal yang lain perlu disampaikan, maka kita akan bacakan draf kesimpulan kita, silakan ditayangkan.

Draf Kesimpulan Rapat Dengan Pendapat Komisi XII DPR RI Dengan Kepala BIG, Selasa, 19 November 2024:

1. Komisi XII DPR RI mendukung penambahan alokasi anggaran BIG dalam rangka mempercepat realisasi penyediaan peta dasar skala besar 1:5.000 untuk seluruh wilayah Indonesia, penguatan kapasitas SDM, maupun industri informasi geospasial, penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional atau JIGN, dan penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta.

**F-P.GOLKAR (Drs.MUKHTARUDIN):**

Ketua, usul.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):**

Karena ini terkait dengan kita akan mendorong peningkatan alokasi anggaran, sehingga anggaran itu tidak hanya sekedar untuk yang disampaikan, dituliskan dalam ini, juga sosialisasinya kepada masyarakat juga dicantumkan dalam kesimpulan. Jadi, biar program sosialisasi itu meningkat dari tahun ke tahun terhadap yang peta geospasial dimiliki oleh kita. Jadi, sosialisasinya ditambah.

**KETUA RAPAT:**

Ya, itu ada di nomor dua *tuh*, Pak Mukhtar.

Batas desa iya, oke ya, satu setuju ya? Setuju?

**(RAPAT : SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

2. Komisi XII DPR RI meminta Kepala BIG untuk meningkatkan anggaran program terkait sosialisasi penentuan batas desa dan kecamatan di daerah.

Itu, Pak Mukhtar.

**F-P.GOLKAR (Drs.MUKHTARUDIN):**

Mungkin sosialisasinya tidak hanya sekedar penentuan batas desa, *tapi* sosialisasi tentang gempa, dan tentang bencana, tentang segala macam, itu juga di-*anukan*. Jadi, mungkin sosialisasi secara umum terkait apa program-program prioritas yang dilakukan oleh BIG.

**KETUA RAPAT:**

Ada di tiga itu, Pak.

**F-P.GOLKAR (Drs.MUKHTARUDIN):**

Ada lagi yang ketiga? Saya kira satu aja.

**KETUA RAPAT:**

Nomor 2 setuju, ya?

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Mohon izin, Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Untuk memperluas dan memfasilitasi ini, kalau biasanya kita menggunakan terminologi Bakti Geospasial, sehingga nanti di dalamnya bisa sosialisasi batas, kemudian literasi geospasial, mitigasi bencana, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau diizinkan, konkretnya meminta Kepala BIG untuk meningkatkan anggaran Program Bakti Geospasial.

**F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO):**

Bakti Geospasial?

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Ya, sudah di situ nanti bisa masuk banyak hal ya termasuk pemetaan kebencanaan. Jadi, tidak perlu kita sebutkan di situ.

**F-P.GOLKAR (Drs.MUKHTARUDIN):**

Termasuk sosialisasi untuk kemasyarakatan di Dapil masing-masing Anggota itu ya.

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Persis, persis, iya.

**INTERUPSI F-P.GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi, Pak Ketua. Saya pikir, biarpun *udah* disebut Program Bakti Geospasial, Pak Kepala BIG, perlu disebut antara lain penentuan batas desa dan kecamatan, supaya karena yang baca ini *nggak* selalu yang tahu. Orang keuangan supaya paham dia, memang di Dapil diperlukan itu. Kira-kira *gitu*, digiring, digiring persepsinya *gitu*, Pak Kepala BIG.

**KETUA RAPAT:**

Jadi, maksudnya agak diperjelas *gitu*, Pak Ramson.

**F-P.GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Kalau kita kan sudah pahami Komisi XII, *ya kan*. Yang sana yang Bagian Keuangan itu.

**KETUA RAPAT:**

Oke, saya ulang.

**F-P.GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

*Makasih, makasih.*

**KETUA RAPAT:**

Saya ulang.

Komisi XII DPR RI meminta kepada Kepala BIG untuk meningkatkan anggaran program Bakti Geospasial antara lain penentuan batas desa dan kecamatan di daerah mitigasi kebencanaan dan program-program prioritas BIG lainnya.

Setuju, ya?

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Jadi, Program Bakti Geospasial koma, antara lain sosialisasi penentuan, ya.

**KETUA RAPAT:**

Oh ya, ya, ya, saya ulang, ya.

2. Komisi XII DPR RI meminta Kepala BIG untuk meningkatkan anggaran Program Bakti Geospasial, antar lain sosialisasi penentuan batas desa dan kecamatan di daerah mitigasi kebencanaan dan program-program prioritas BIG lainnya.

Setuju?

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

3. Komisi XII DPR RI meminta Kepala BIG untuk memperkuat peran dalam pengelolaan tata ruang dan tata wilayah, mitigasi kebencanaan, dan pemetaan potensi Sumber Daya Alam.

Setuju, ya?

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

4. Komisi XII DPR RI meminta Kepala BIG untuk meningkatkan kemudahan akses penggunaan informasi geospasial kepada pemerintah daerah.

Bagi kali ya, bukan kepada? *nggak* perlulah Komisi XII, *nggak* perlulah, sudah pastilah itu, ya.

**F-PDI PERJUANGAN (SHANTY ALDA NATHALIA, S.H.):**

Masyarakat juga, apa, Pimpinan, izin. Bagi masyarakat juga mungkin ya untuk akses penggunaan informasi.

**KETUA RAPAT:**

Pemerintah daerah dan masyarakat. *Nah* itu lebih, *iya*, *tapi* masyarakat nanti *kan* secara, ini harus berkoordinasi dengan BIG kan, minta untuk akses membuka peta ini.

**F-P.GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Atau masyarakat yang direkomendasikan oleh, kira-kira siapa?

f

**KETUA RAPAT:**

*Nggak* apa-apa begini *aja*. Nanti di dalamnya itu kan mereka akan meminta kepada BIG untuk memiliki, minta syarat dan kewajiban mereka untuk menarik data ini.

Oke saya ulang ya.

Komisi XII DRP RI meminta Kepala BIG untuk meningkatkan kemudahan akses penggunaan informasi geospasial bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Setuju?

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

Terakhir

Komisi XII DPR RI meminta Kepala BIG untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi XII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi XII DPR RI paling lambat tanggal 26 November 2024.

Setuju?

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

**F-PDI PERJUANGAN (SHANTY ALDA NATHALIA, S.H.):**

Izin melengkapi, Pimpinan. Boleh saya melengkapi, Pimpinan. Komisi XII meminta agar Kepala BIG menetapkan atau merekomendasikan satu peta dasar yang dipakai secara nasional untuk semua instansi, untuk supaya satu seragam semua.

**KETUA RAPAT:**

*One Map Policy.*

**F-PDI PERJUANGAN (SHANTY ALDA NATHALIA, S.H.):**

Terkait instansi dan departemen. Ya, lintas kementerian ya, agar bisa seragam.

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Izin, sebetulnya boleh, Pak, menanggapi?

**KETUA RAPAT:**

f

Silakan, silakan.

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Ini sudah ada di Perpres 23/2021 sebetulnya tentang Kebijakan Satu Peta, *tapi* kalau mau di sini ya *nggak* apa-apa.

**KETUA RAPAT:**

Ya, kita kalau itu sudah ada di ketentuan, sudah ada Perpres, berarti sudah kuat ada di Perpres ya. Tolong dilihat lagi, Mas. Oke, cukup?

**Bapak Ibu yang saya hormati,**

Demikianlah pembahasan agenda rapat dengar pendapat kita hari ini. Sebelum mengakhiri rapat, kami persilakan kepada Kepala BIG untuk menyampaikan sambutan untuk penutup atau *closing statement*.

Kami persilakan.

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (Prof. Dr. rer. nat. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan Komisi XII, dan Bapak/Ibu Anggota Komisi XII. Pertama, Badan Informasi Geospasial mengucapkan banyak terima kasih untuk pertemuan perdana antara BIG dan Komisi XII, serta perkenalan yang sudah kita laksanakan.

Yang kedua, kami mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Komisi XII, tidak saja untuk peningkatan atau penambahan anggaran, tetapi juga untuk penajaman dari program yang kita laksanakan. *Insyah Allah*, berbagai arahan tadi akan kita formulasikan lebih lanjut dalam tanggapan tertulis BIG, dan sekali lagi kami mohon dukungan dari Bapak/Ibu sekalian untuk informasi geospasial yang lebih baik lagi di Indonesia.

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, kami sampaikan kepada Kepala BIG beserta jajarannya atas kerja samanya yang baik dalam rapat ini. Kami atas nama Pimpinan Komisi XII DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi XII DPR RI.

Akhirnya mengucapkan, *alhamdulillah*, Rapat Dengar Pendapat pada hari ini saya nyatakan ditutup.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,*

f

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.12 WIB)  
(KETUK PALU 3 KALI)**

**a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**DWIYANTI, S.Sos.  
NIP. 196903131990032002**